PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

UNIT KERJA : **PIMPINAN TERTINGGI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JULIYATMONO**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **37933**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 7.664.500.000

1. Tanah Seluas 1823 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 305 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/600 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 3.480.000.000
4. Tanah Seluas 8500 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
5. Tanah Seluas 160 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
6. Tanah Seluas 254 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 444.500.000
7. Tanah Seluas 254 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 390.900.000

1. MOBIL, NISSAN TERRANO JEEP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, WARISAN Rp. 2.700.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. MOBIL, DODGE JOURNEY 2.4 AT MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
7. MOTOR, HONDA REBEL MOGE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**183.359.050**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**599.124.246**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**8.837.883.296**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**8.837.883.296**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.